

No. Alumni Universitas	Novita Anggraini	No. Alumni Universitas
Tempat/Tanggal Lahir: Bengkulu/ 24 November 1992. Nama Orang tua: H. Dasmadi Zainun, Hj. Sumarni. Fakultas: Hukum. Jurusan: Hukum Tata Negara (PK VI). Nomor BP: 1010112015. Tanggal Lulus: 26 Maret 2014. Predikat Lulus: Sangat Memuaskan. IPK: 3,58. Lama Studi: 3 Tahun 7 Bulan. Alamat: Jl. Flamboyan Raya Nomor 68 Skip Kota Bengkulu.		

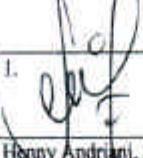
**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK JALANAN DAN IMPLEMENTASINYA DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN**

(Novita Anggraini, 1010112015, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 Halaman, Tahun 2014)  
Pembimbing: Didi Nazmi, SH.,MH. & Charles Simabura, SH.,MH.

**ABSTRAK**

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai generasi penerus bangsa yang didalam dirinya melekat hak-hak sebagai manusia yang harus diberikan bimbingan dan pembinaan agar dapat berkembang sebagai anak yang cerdas seutuhnya. Negara dan Pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) menyatakan dengan jelas bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selanjutnya hak anak di Indonesia tidak hanya berpedoman kepada konstitusi tetapi banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah. Kota Padang telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai hak anak tetapi Peraturan Daerah ini belum terlaksana secara baik, masih banyak permasalahan yang terjadi mengenai anak jalanan. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana bentuk pengaturan pemenuhan hak anak jalanan di Kota Padang? Kedua, Bagaimana implementasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang setelah berlakunya Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen Dan Pedagang Asongan? Ketiga, Apa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak jalanan di Kota Padang dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah metode *sosio legal*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: Pertama, pemerintah Kota Padang telah menetapkan dua Peraturan Daerah Kota yakni Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2012. Kedua, dalam hal implementasi Peraturan Daerah Kota tersebut belum dapat menyelesaikan persoalan masalah anak jalanan secara efektif. Ketiga, kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yakni sarana dan prasarana yang kurang memadai, minimnya dana dari keuangan daerah dan masyarakat Kota Padang itu sendiri.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim pengujii dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Maret 2014 abstrak telah disetujui pengujii:

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Henny Andriani, SH.,MH.	Alsyam, SH.,MH.

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Tata Negara: Dian Bakti Setiawan, SH.,MH.

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Alumnus	Nama:	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan